

Community Participation In The 2019 Legislative Elections In The Border Area Of Kampar District With Pekanbaru City

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 2019 Diwilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru

Candra Jon Asmara¹, Rusdi²

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau^{1,2}

candra.asmara@yahoo.co.id¹, Rusdi@uin-suska.ac.id²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The aim of this research is to describe community participation and the efforts made by the KPU to maximize community participation in the implementation of the 2019 Legislative Election in the border area of Kampar Regency and Pekanbaru City. The results of the research show that community participation in the 2019 Legislative Election in the border area of Kampar Regency with Pekanbaru City, tends to be apathetic political participation in the 2019 Legislative Election. This can be seen from the awareness of the community in the border area of Kampar Regency with Pekanbaru City which is not registered in the List. Permanent voters (DPT) because they don't care about arranging KTPs where they live. Apart from that, people who live in the border area between Kampar Regency and Pekanbaru City are generally immigrants who buy public housing or complex houses and their population administration still comes from their home villages.

Keywords: Political Participation, Political Education And Election Process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan upaya yang dilakukan KPU untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di wilayah perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 di wilayah perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, cenderung apatis terhadap partisipasi politik pada Pemilu Legislatif 2019. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak peduli dengan pengurusan KTP di tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru pada umumnya adalah masyarakat pendatang yang membeli perumahan rakyat atau rumah kompleks dan administrasi kependudukannya masih berasal dari kampung halamannya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pendidikan Politik, Dan Proses Pemilu

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu bentuk sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik karena dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dituntut agar pelaksanaan pemerintahan dapat aman, tertib dan lancar sehingga pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk kesejahteraan seluruh Bangsa Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang baik akan menghasilkan pencerahan perpolitikan di Indonesia sehingga pemilu juga menjadi ajang untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang hidup dalam negara yang demokrasi

Pelaksanaan pemilu tahun 2004 dicatat sebagai pengalaman baru yang sangat penting dalam perpolitikan di Indonesia, karena pemilihan calon-calon eksekutif maupun kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa sebagian besar elit politik Indonesia saat ini direkrut secara langsung oleh konstituennya. Kondisi ini menurut

Ignas Kleden dalam Syamsudin Haris (2005) ada keadaan yang belum memungkinkan “sifat langsung” rekrutmen politik ini terwujud diantaranya ketentuan Undang-Undang Pemilu bahwa terpilihnya seorang calon legislatif ditetapkan pertama-tama berdasarkan angka BPP (yang sangat jarang tercapai), sementara mereka yang tidak mencapai angka BPP akan dipilih berdasarkan nomor urut pada pencalonan dan bukannya berdasarkan banyak suara yang diperoleh (sementara nomor urut tersebut ditentukan oleh masing-masing partai peserta pemilu), jelas mengurangi tingkat kelangsungan pemilihan oleh rakyat.

Kondisi Pemilu Legislatif 2004 tentunya berbeda dengan pemilu pada masa kepemimpinan orde baru. Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru dari waktu ke waktu membuktikan kemerosotan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berfungsi sebagai rekrutmen politik, komunikasi politik dan sosialisasi politik untuk kepentingan rakyat mengalami proses kebangkrutan sehingga ditandai dengan adanya proses kematian partai politik secara perlahan oleh rezim yang berkuasa.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu 2019 menggabungkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, memiliki banyak permasalahan, salah satunya adalah tidak bisanya masyarakat tempatan yang KTPnya bukan ditempat tinggalnya. Masalah ini banyak terjadi, khususnya di daerah perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru

Wilayah perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru meliputi wilayah Kabupaten Kampar yakni, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tapung. Sedangkan yang berbatasan dengan wilayah Kota Pekanbaru meliputi Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Kampar pada umumnya adalah masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan yang pada umumnya juga memiliki identitas kependudukan Kota Pekanbaru.

Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019, masyarakat yang tinggal di perbatasan Kabupaten Kampar kurang memiliki partisipasi politik, terutama dalam partisipasi politik pemilu legislatif. Secara normative mereka yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Kampar seharusnya memilih wakil mereka di DPRD Kabupaten Kampar, namun mereka tidak bisa memilih karena tidak adanya KTP wilayah Kabupaten Kampar

Tujuan Penelitian ini Mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dan Upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru.

2. Tinjauan Pustaka

Ilmu Politik

Ilmu politik menurut Sharma dalam Suhelmi (2004:7) lahir berdasarkan konsep teori imperium. Teori imperium adalah teori tentang kekuasaan dan otoritas Negara dimana kedaulatan dan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pendelegasian kekuatan kepada penguasa Negara. Penguasa politik hanyalah lembaga yang dipercaya untuk memegang (bukan menguasai dan mendominasi) serta mempergunakan kedaulatan demi kebaikan seluruh rakyat.

Kajian ilmu politik tidak jauh berbeda dengan kajian ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun fokus dari kajian ilmu politik adalah kekuasaan dalam suatu Negara dan proses pencapaian kekuasaan tersebut. Menurut Soltau dalam Kencana dan Azhari (2005:8) Ilmu politik untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan antar negara dan warga negaranya, serta hubungan antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya. Sedangkan lebih lanjut menurut Robert A. Dahl Kencana dan Azhari (2005:8) ilmu politik adalah sudah barang tentu pelajaran tentang siasat, atau lebih baik pula dikatakan, hal ini sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara yaitu

usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas.

Dari pandangan tentang ilmu politik di atas dapat dikatakan bahwa ilmu politik merupakan taktik atau cara dalam mengatur kehidupan dan berbangsa oleh para pelaku atau elit politik. Pengaturan kehidupan berbangsa oleh penguasa politik tidak terlepas dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat sebagai pemberi kekuasaan kepada para penguasa. Selain dari pada itu, ilmu politik juga mengkaji hubungan antara negara dengan masyarakat dan negara-dengan negara lainnya, yang dibentuk berdasarkan aturan hukum yang ada. Dengan adanya ilmu politik maka berkembanglah pemikiran politik, sehingga muncul berbagai system politik dalam suatu Negara.

Partisipasi Politik dan Sosialisasi Politik

Setiap negara demokrasi, sudah menjadi suatu kewajiban untuk menyalurkan aspirasi rakyat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Menurut Sanit (2002:19) sementara revolusi membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik di Indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk melayani segala perubahan tersebut. Perubahan ini hendaknya diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak politik.

Salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi tersebut dengan cara pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilihan umum. Pemilihan umum pada dasarnya melakukan pemilihan terhadap partai politik sebagai kontestan pesta demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 pasal 1 menyebutkan bahwa, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Partai politik menurut Sigmund Neumann dalam Haryanto (1982:86) memberikan batasan partai politik sebagai berikut : "Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Sedangkan pengertian partai politik menurut Surbakti (1992:116) merupakan kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.

Sedangkan menurut Mirriam Budihardjo (1993:164) menjelaskan bahwa partai politik, menjalankan fungsi sebagai berikut;

1. Sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. Sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik kepada masyarakat. Dalam usaha menguasai pemerintahan lewat pemilihan umum, partai politik harus memperlihatkan *image* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat dan aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai itu telah memperluas partisipasi politik.
4. Sebagai sarana mengatur konflik. Dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Lebih lanjut menurut Hatington P. Samuel (1983:632) menjelaskan bahwa kekokohan partai dapat dilihat dari beberapa tahapan;

- a. Kemampuan yang untuk mempertahankan pendiriannya atau para pemimpin kharismatik yang pertama kali membawanya ke puncak kekuasaan.
- b. Kompleksitas dan kedalaman organisasional dalam hal ini bias disimak dari keakraban hubungan antara partai politik dengan sejumlah organisasi sosial ekonomi.
- c. Sejauh mana aktifitas politik dan pendambaan kekuasaan identik dan larut bersama dengan partai sebagai sebuah wahana guna mencapai tujuan.

Pemikiran Tentang Pemilu

Dari pandangan diatas dapat dikatakan bahwa setiap partai politik perlu melakukan sosialisasi dari program yang dia miliki untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga partisipasi politik masyarakat akan partai tersebut akan meningkat. Selain dari pada itu keberadaan partai ditengah masyarakat perlu disosialisasikan untuk menumbuhkan partisipan dari masyarakat serta masyarakat banyak menaruh harapan dari partai tersebut untuk mendudukkan orang-orang pilihan dalam puncak kekuasaan. Sosialisasi politik juga dipengaruhi oleh orientasi pemilih dari partai tersebut, jika partai yang ikut kontestan Pemilu berbasis pada masyarakat awam atau masyarakat yang ekonomi menengah kebawah, maka orientasi politik dari partai tersebut hendaknya mencerminkan perjuangan rakyat kecil. Hal inilah yang dilakukan oleh Partai politik dalam menjual visi dan misi mereka untuk menarik simpatisan masyarakat, terutama kaum buruh, nelayan, petani dan para pedagang kecil, serta masyarakat lainnya termasuk pemilih pemula yang sering disebut dengan kaum milenial

3. Metode Penelitian

Lokasi dari penelitian ini di Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai Lokasi penelitian dimana kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut F.L. Whitney dalam Nazir (1999:63) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan demikian penelitian ini akan menerangkan atau menjelaskan yang menyangkut tentang masalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru, dan Upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru, hasil survey yang dilaksanakan, serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan observasi dan analisis data primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan data sekunder. Analisis data primer dilakukan untuk memperoleh hasil pembahasan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru, dan Upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru

4. Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 diwilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru

Partisipasi politik merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik bagi masyarakat dapat disalurkan melalui proses pemilihan umum, baik pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan Pemilihan anggota legislatif ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Partisipasi politik masyarakat dapat diklasifikasikan hal ini dapat dilihat dari penjelasan dan pendapat dari Milbrath and Goel yang menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Golongan Apatitis, merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektator, merupakan orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
3. Gladiator, tujuan agar pemerintah suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik dengan cara merupakan mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam proses politik.
4. Pengkritik, dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Individu tersebut memberikan opini pemerintah dengan mengkritik.

Partisipasi politik masyarakat perlu digerakkan atau dimobilisasi oleh pemangku kebijakan dan juga oleh seluruh aparatur pemerintahan, untuk melibatkan masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka dalam proses pemilihan umum yang berjalan sekali lima tahun. Salah satu partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan umum di Indonesia adalah pemerilihan wakil rakyat di tingkat pusat (DPR RI), ditingkat Provinsi (DPRD Provinsi) dan ditingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Keterlibatan masyarakat dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan calon anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota, dapat menjadi tolak ukur bahwa kehidupan politik masyarakat tersebut sudah meningkat atau malahan mengalami kemunduran. Pemilihan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, merupakan saluran politik bagi masyarakat sebagai upaya untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada Anggota DPRD untuk mengawasi jalannya Pemerintahan Kabupaten/Kota dan juga sebagai upaya masyarakat dalam mengusulkan kegiatan pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Partisipasi politik masyarakat salah satunya keikutsertaan mereka dalam menyalurkan hak suaranya dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dalam rangka memilih wakil mereka yang duduk dilembaga legislatif, dengan harapan pilihan mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses pembangunan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Salah satu daerah yang melaksanakan Pemilu Legislatif 2019 adalah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, sudah barang tentu memiliki berbagai persoalan, khususnya persoalan partisipasi masyarakat di perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru.

2. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 Diwilayah Perbatasan Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pemilu Legislatif tahun 2016. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, KPU Kabupaten Kampar berupaya untuk mensukseskan setiap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kampar, termasuk Pemilu Legislatif tahun 2019. Upaya yang dilakukan selama ini oleh KPU Kabupaten Kampar sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, termasuk masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar adalah,

- a. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan oleh KPU Kampar dilaksanakan dengan mengundang tokoh-tokoh tersebut. harapan dari penyuluhan tersebut, adalah sebagai agen penyuluh kepada tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat diwilayah mereka masing-masing.
- b. Sosialisasi Melalui Media Massa Cetak. Adapun media masa cetak yang dipilih oleh KPU Kabupaten Kampar adalah media cetak lokal, yakni Riau Pos dan Haluan Riau
- c. Sosialisasi Melalui Media Massa Elektronik. yang dilakukan KPU Kabuapten Kampar, dilakukan dengan cara menerbitkan iklan sosialisasi, pengumuman-pengumuman, peraturan-peraturan dan berita-berita seputar kegiatan KPU Kabupaten Kampar dan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, melalui PT. Radio 97,1 FM Radio Pratama Bangkinang, Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1, dan jejaring sosial dan sosialisasi melalui Riau Televisi
- d. Sosialisasi Melalui Alat Peraga, melalui baliho yang disebarakan ke setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar

5. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, lebih cenderung bersifat partisipasi politik yang apatis dalam Pemilu Legislatif tahun 2019. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) karena mereka tidak peduli dalam pengurusan KTP ditempat mereka berdomisili.

Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, sudah dilakukan, untuk mengurus administrasi kependudukan secara gratis yang difailitasi oleh pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tinggal diwilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru oleh KPU Kabupaten Kampar, Panitia Pemilih Kecamatan, Aktor Politik dan Kepala Desa. Dari keempat stakeholder tersebut, peranan Kepala Desa lebih dominan, termasuk mengajak masyarakat yang tinggal diwilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru bisa berperan dalam proses politik terutama dalam Pemilu Legislatif 2019. Selain dari pada itu, masyarakat yang tinggal diwilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru pada umumnya masyarakat pendatang yang membeli rumah perumnas atau rumah kompleks dan administrasi kependudukannya masih berasal dari desa asal mereka

Daftar Pustaka

- Alwis. 1994. *Perilaku Pemilih dalam Pemilu 1992 di Dati I Riau*. Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Haris, Syamsudin. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarkhi Partai – Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Deliar Noer. 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta : PT Rajawali Press
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty
- Hatington P. Samuel. 1983. *Tertib Politik didalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kencana Inu dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Mardjono, Martono. 1996. *Politik Indonesia (1996-2003)*. Jakarta : Gema Insani Press
- Milbrath and Goel https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik
- Mirriam Budihadrjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Perintis Gramedia.

- _____. 1986. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : PT. Perintis Garamedia.
- Nazir. Moh, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sanit, Arbi. 2002. *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudibyo, M. 1995. *Pemilihan Umum 1992 Suatu Evaluasi*. Jakarta : CSIS
- Suhelmi, Ahmad. 2004. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Perintis Grasindo.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Edisi 1 Januari 2001. Pekanbaru.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Jakarta : CV Eka Jaya
- Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2005, *Undang-Undang Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Sinar Jakarta : Grafika